



205

Proses Perdamaian Arab - Israel

Peluang dan Kendala

Oleh : Riza Sihbudi

Dengan segala kompleksitasnya, Timur Tengah tidak mudah untuk dipahami secara komprehensif oleh para analis dan pengamat luar. Contoh yang paling sederhana adalah mengenai istilah "Timur Tengah" (Middle East) -- atau yang dulu sering disebut sebagai "Timur Dekat" (Near East) -- itu sendiri. Hingga saat ini belum ada kesepakatan di kalangan para ahli politik internasional -- juga diplomat dan media massa -- mengenai definisi tentang "Timur Tengah". Juga, mengenai bangsa, negara, dan kawasan mana yang dapat dimasukkan dalam kategori "Timur Tengah".

Konsep "Timur Dekat" pertama kali muncul di Barat pada abad ke-15, yang merujuk pada suatu kawasan yang berada di antara benua Eropa dan Timur Jauh (Far East). Istilah "Timur Dekat" pada mulanya dipakai untuk kawasan yang dikuasai Kekaisaran Ottoman setelah tahun 1453. Selama berlangsungnya Perang Dunia (PD)II, Inggris mulai secara resmi menggunakan istilah "Timur Tengah":

1. Salah satu organisasi terbesar pihak Sekutu yang dikelola bersama oleh Inggris dan Amerika Serikat (AS) diberi nama "Middle East Supply Center", yang berfungsi melayani kebutuhan



Pertemuan KTT "darurat" di Sharm Al Sheikh

mereka di kawasan Arab, Turki, Iran (ATI) dan negara-negara disekitarnya.

2. Semua aktivitas militer Sekutu di kawasan tersebut berada dibawah lembaga bernama "the British Middle East Command". Setelah PDII sejumlah akademisi, peneliti, dan pengamat Barat tetap menggunakan istilah "Timur Tengah" untuk merujuk pada negara-negara di kawasan ATI dan sekitarnya.

Akan tetapi batasan definitif tentang "Timur Tengah" tetap menjadi perdebatan yang tak kunjung usai. Bahkan mengenai istilah "Timur Tengah" itu sendiri. Di Washington (AS), misalnya, ada lembaga bernama Middle East Institute yang melakukan studi mengenai kawasan ATI dan sekitarnya. Namun kawasan yang sama oleh Lembaga The National

Geographic Society tetap disebut sebagai "Near East". Sebagai semacam jalan kompromi, Deplu AS lalu menggunakan istilah "Near and Middle East".

Sementara itu, di kalangan para ahli sekurang-kurangnya ada tiga pendapat:

1. Yang mendefinisikan "Timur Tengah" sebagai kawasan yang mencakup negara-negara Arab non-Afrika ditambah Iran dan Israel.
2. Yang memasukkan seluruh negara anggota Liga Arab ditambah Iran, Israel, dan Turki.
3. Yang memasukkan negara-negara seperti pada pandangan kedua, ditambah Afghanistan, Pakistan, dan republik-republik Muslim ex-Soviet.

Terlepas dari perdebatan tersebut diatas, secara umum istilah "Timur Tengah" dipergunakan untuk merujuk pada suatu kawasan yang membentang dari Mesir di ujung barat sampai Iran di ujung timur, dan dari Turki di ujung utara hingga Semenanjung Arabia di ujung selatan. Dilihat dari aspek pengelompokan sosio-etnisitas, bangsa Arab merupakan yang terbesar (45%) di Timur Tengah, yang kemudian diikuti oleh Turki (19%), Parsi (12%), Kurdi (8%), Azeri (6%), dan sisanya (10%) lain-lain, termasuk bangsa Yahudi.

Timur Tengah menjadi satu-



The Arab - Israeli Peace Process: Chances and Obstacles

By: Riza Sihbudi



Arabia and their neighbours.

2. All Allied military activity in this area was under an institution called "the British Middle East Command". After World War 2 a number of Western academics and researchers retained the Middle East designation to denote this Arab-Turkey-Iran region.

But a definitive border for the "Middle East" remains under discussion. In Washington, for example, there is a Middle East Institute which researches the Arab-Turkey-Iran area and surrounding areas. But the same region is still called the Near East by the National Geographic Society. As a

compromise, the US foreign ministry uses the term "Near and Middle East".

Meanwhile, among analysts there are three broad opinions:

1. The Middle East comprises the Asian Arab countries plus Iran and Israel.
2. It includes all Arab League countries plus Iran, Israel and Turkey.
3. It includes all the Arab league countries plus Iran, Israel, Turkey, Afghanistan, Pakistan and the Islamic ex-Soviet Republics.

Leaving aside this debate, in general the term Middle East is used to refer to an area stretching from

In its great complexity, the Middle East cannot be easily understood by outside analysts and experts. A simple example concerns the label itself "Middle East"- or the "Near East" as it was previously. Up to now there is no agreement among international political experts, diplomats and the mass media on the definition of the Middle East or on which nations, states and areas.

The concept of "Near East" emerged in the West in the 15th century indicating an area between the European continent and the Far East. The label initially referred to the area occupied by the Ottoman Empire after 1453. During World War 2, Britain officially began to use the label "Middle East".

1. One of the largest allied organisations jointly controlled by Britain and America was called the "Middle East Supply Centre" and functioned to serve their needs in Iran, Turkey,



The fate of the Palestinian children



satunya kawasan di dunia ini yang mempertemukan sekaligus tiga benua, yaitu Asia, Afrika dan Eropa. Inilah yang menjadikan Timur Tengah sebagai salah satu kawasan paling strategis di muka bumi. Dari aspek ekonomi, Timur Tengah menjadi amat penting karena kandungan energi alam (khususnya minyak) yang ada di kawasan ini. Sebagaimana diketahui, hingga detik ini peranan minyak tak pernah berhenti sebagai ajang perebutan kepentingan ekonomi dan politik kekuatan-kekuatan ekstra regional.

Juga, tidak bisa dipungkiri sumbangan Timur Tengah bagi peradaban umat manusia.

1. Tiga agama besar samawi atau monoteis yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam yang dianut mayoritas penduduk bumi, berasal dari kawasan ini.
2. Sumbangan Timur Tengah di bidang ilmu pengetahuan juga tidak kecil. Para ilmuwan asal Timur Tengah yang lahir pada abad ke-9 sampai ke-11 seperti al-Kindi (Alkindius), al-Farabi (Alpharabius), Ibnu Sina (Avicenna), al-Ghazali, Ibnu Rusyd (Averroes), al-Razi (Rhazes) dan Ibnu Khaldun, secara luas diakui peranan dan pengaruhnya dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan: dari filsafat, matematika, fisika, ilmu kedokteran, sampai astrologi. Ini diperkuat dengan adanya sejumlah istilah di bidang ilmu pengetahuan yang sepenuhnya berasal dari bahasa Arab seperti Aljabar (Aljabar), azimuth, nadir dan zenith.

Pada masa lalu sejumlah peradaban yang sangat berpengaruh di Timur Tengah, di antaranya adalah Mesir, Babylonia dan Assyria. Dari awal abad ke-19 hingga periode 1919-1920 ada tiga otoritas politik penting di kawasan ini yaitu, Kerajaan Ottoman (Usmaniah) Turki, Kerajaan Mesir, dan Dinasti Qajar di Iran. Pada era ini Islam menjadi faktor dominan di Timur Tengah. Setelah runtuhnya Dinasti Ottoman, Westernisasi mulai merasuk bersamaan dengan menguatnya pengaruh kolonialisme

Inggris dan Prancis ke kawasan ini. Fenomena ini antara lain ditandai dengan munculnya gagasan sekularisme yang dikembangkan Kemal Ataturk di Turki. Namun pada saat hampir bersamaan muncul pula gerakan-gerakan Islam reformis seperti Wahabiyah, Sanusiyah, dan Mahdiah, yang mewakili kecenderungan resistensi terhadap Westernisasi.

Masyarakat internasional "terianjur" mengidentikkan Timur Tengah sebagai kawasan yang rawan konflik. Dalam beberapa dekade terakhir ini, paling tidak sejak 1948 (saat terbentuknya negara Israel yang "dicangkokkan" oleh Dunia Barat di tengah-tengah Dunia Arab), pemberitaan masalah Timur Tengah hampir tidak pernah dilepaskan dari tiga hal, yaitu: "darah, minyak dan senjata".

Di kawasan Timur Tengah, batasan antara perang dan damai menjadi sangat kabur. Hari ini damai, besok bisa perang; atau sebaliknya. Mengapa demikian? Barangkali tidak seorangpun yang mampu menjawabnya dengan pasti. Namun, secara sederhana, bisa dilihat dari sejumlah faktor. Diantaranya adalah:

1. Berkaitan dengan karakter budaya yang sulit dilepaskan dari faktor lingkungan alam (padang pasir yang gersang dan panas). Karenanya, temperamen yang tinggi menjadi salah satu ciri mereka yang paling menonjol.
2. Faktor kekayaan alam (minyak) yang melimpah menjadi daya tarik bagi kekuatan-kekuatan ekstra regional (luar kawasan) untuk cenderung melakukan intervensi dalam setiap persoalan internal yang muncul. Dengan kata lain, potensi ekonomi yang dimiliki Timur Tengah, menjadikan kawasan ini hampir "mustahil" untuk bisa lepas dari kepentingan politik pihak-pihak luar, terutama negara-negara Barat, dan lebih khusus lagi, AS. Ini berkaitan erat dengan fakta belum ditentukannya sumber energi alternatif bagi proses industri Barat di satu sisi dan ketergantungan

(sebagian) negara-negara Timur Tengah terhadap teknologi Barat di sisi lain.

3. Kepentingan ekonomi-politik Barat di Timur Tengah menjadi semakin besar dengan keberadaan negara Israel. Barat tidak hanya memandang Israel sebagai "wakil" (secara kultural-historis maupun sosio-politis) mereka di kawasan ini, namun juga berkaitan dengan kenyataan adanya dominasi ekonomi-politik etnik Yahudi, terutama di AS. Karena itu tidaklah terlalu mengherankan jika dalam media massa AS, misalnya, Arab sering sekali dikaitkan dengan "terorisme" sementara Israel disanjung sebagai "panji-panji demokrasi". Oleh sebab itu, bisa dipahami pula, jika AS senantiasa tidak berdaya mengatasi sikap keras elite politik Israel yang secara terang-terangan melanggar hukum internasional.

Dalam situasi dan kondisi di mana dunia internasional (khususnya AS) tidak mampu mengerem sikap keras Israel, tampaknya menjadi tanda tanya besar perihal masa depan proses perdamaian di Timur Tengah. Akan tetapi, yang tidak kalah ironisnya adalah sikap negara-negara Arab sendiri. Sampai kini, sama sekali tidak terlihat keseriusan mereka untuk sungguh-sungguh membela nasib bangsa Palestina. Dalam kenyataannya, mereka pun sudah terjebak petrodolar yang berlimpah, justru tampak "lebih asyik dengan kenikmatan" mereka sendiri daripada serius memikirkan--apalagi memperjuangkan-- nasib bangsa Palestina. Ini semakin memperkuat asumsi telah matinya "Pan-Arabisme".

Paling kurang ada dua faktor di balik ketidak-jelasan sikap dunia Arab terhadap masalah Palestina.

1. Negara-negara Arab, sebagaimana sering disinyalir para pengamat Timur Tengah, sebenarnya justru merasa khawatir terhadap kemungkinan lahirnya negara Palestina merdeka. Bangsa Palestina sering dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang "lebih tinggi"



Egypt in the West to Iran in the East and from Turkey in the north to the Arabian peninsula in the south. Seen from the aspect of socioethnic grouping the Arab people predominate in this area (45%), followed by Turks (19%), Farsis (12%), Kurds (8%), Azeris (6%) and others, including Jews, (10%).

The Middle East is at the meeting point of three continents- Africa, Asia and Europe. This is what makes the Middle East one of the most strategic areas in the world. Economically, the Middle East is especially important for its natural energy resources (especially oil).

Upto now, the role of oil in industrialisation has not been replaced. This is why the Middle East has never ceased to be an object of dispute among the economic and political interests of extra-regional powers.

One also cannot deny the great contribution of the Middle East to world civilisation.

1. The three great monotheistic religions - Judaism, Christianity and Islam - followed by a majority of the world's people, originated here.
2. The contribution of the middle East to science is also quite large. The 9th to 11th century scientists such as al-Kindi (Alkindius), al-Farabi (Alpharabius), Ibnu Sina (Avicenna), al-Ghazali, Ibnu Rushd (Averroes), al-Razi (Rhazes) and Ibnu Khaldun are widely acknowledged for their influence in various branches of science: philosophy, mathematics, physics, medicine and astrology. This is shown by the number of scientific terms deriving from Arabic such as algebra, azimuth, nadir and zenith.

In the past there were many influential civilisations in the Middle East, among them Egypt, Babylon and Assyria. From the beginning of

the 19th century until 1920 there were three important authorities in the region: the Ottoman (Usman) Empire of Turkey, the Kingdom of Egypt and the Qajar Dynasty in Iran. In this era Islam became a dominant factor in the Middle East. After the collapse of the Ottoman Empire, westernisation began to take over- together with a stronger British and French colonial influence. This phenomenon was marked among other things by the secularist idea developed by Kemal Ataturk in Turkey. But at the same time there emerged Islamic reform

The Arab countries, as often signalled by Middle East analysts, are afraid of the birth of an independent Palestinian nation. The Palestinian people are often considered to have a higher intellectual level than Arab peoples in general.

movements like the Wahabiyah, Sanusiyah and Mahdiyah, representing a tendency to resist Westernisation.

The international community has been drawn to identify the Middle East as a region marked by conflict. In the past few decades, at least since 1948 (since the setting up of the state of Israel, which was grafted by the Western world into the middle of the Arab world), news of the Middle East has been inseparable from three things: "blood, oil and weapons".

In the Middle East, the line between war and peace has become hazy. Today there may be peace and tomorrow war, or vice versa. Why so? Perhaps no one can answer for certain. But simply put, this could come from

various factors. Among them are:

1. Cultural factors which cannot be separated from the environmental factors (hot and barren sandy desert). For this reason, quick temper is one of the outstanding features of the people.
2. Natural resources (oil), whose abundance is an attraction for extra-regional powers which tend to intervene in every internal problem which arises. In other words, the economic potential of the Middle East makes it a region which cannot be divorced from external political interests, especially of Western countries, and particularly the US. This relates to the persistent failure to find an alternative energy source for Western industries on one hand, and the dependence of some Middle Eastern countries on Western technology on the other hand.
3. Western interest in the Middle East has increased with the existence of the state of Israel. The West not only views Israel as its representative (culturally and sociopolitically) in the Middle East but also features political and economic domination by Jews, especially in the US. Thus it is no surprise if in the US mass media, for instance, Arabs are linked with terrorism while Israel is presented as the standard bearer of democracy. Thus, it can also be understood if the US is unable to overcome the hard attitude of the Israeli political elite, which clearly breaks international law.

In conditions where the international community, particularly the US, is unable to brake the inflexible attitude of Israel, there is a great question mark over the future of the Middle East process. No less ironic is the attitude of Arab countries themselves. Up to now there has been no seriousness seen from them



dibandingkan bangsa-bangsa Arab pada umumnya. Karena itu, mendorong pembentukan negara Palestina merdeka akan "sama" artinya dengan menciptakan "Israel kedua" di kawasan Timur Tengah.

2. Kekuatan-kekuatan regional di dunia Arab, apakah itu Liga Arab, OKI ataupun OPEC, didominasi oleh negara-negara Arab kaya minyak yang secara politis justru merupakan sekutu dekat kalau bisa disebut "boneka" AS. Karenanya hampir-hampir mustahil mengharapkan kesungguhan mereka untuk mengambil sikap politik yang bersebrangan dengan kepentingan AS di kawasan ini, sekalipun untuk membela kepentingan bangsa Palestina.

Tidak bisa dipungkiri bahwa figur Yasser Arafat (Ketua PLO dan Presiden Palestina) sulit untuk dipisahkan dari perjuangan panjang (dan melelahkan) bangsa Palestina untuk dapat membebaskan dirinya dari cengkeraman kaum zionis. Namun, usia Arafat yang sudah semakin lanjut dan kesehatannya yang semakin menurun, menimbulkan kekhawatiran bagi para pendukungnya. Oleh karena itu, mulai muncul spekulasi tentang masalah suksesi kepemimpinan politik di Palestina. Memang, isu suksesi di Palestina sempat mereda setelah Arafat yang dilaporkan pernah jatuh sakit, sudah kembali tampak sehat. Seorang tokoh Palestina mengatakan bahwa kesehatan Arafat sangat bagus ("his health is excellent"). Oleh sebab itu, katanya, mendiskusikan kemungkinan turunnya Arafat dari panggung politik merupakan masalah yang sangat sensitif.

Akan tetapi, mengingat faktor usia yang sudah semakin lanjut, serta mengingat peranan Arafat sebagai salah satu kunci dalam proses perdamaian Timur Tengah, maka munculnya tuduhan dari Ephraim Sneh, bekas menteri kesehatan Israel dari Partai Buruh, bahwa "(PM Israel waktu itu) Netanyahu sebenarnya berharap Arafat lekas pergi agar ia punya dalih bahwa Israel tidak lagi punya mitra untuk menciptakan perdamaian di

kawasan ini.

Arafat memang dipandang terutama oleh Israel dan AS sebagai satu-satunya pemimpin Palestina yang masih bisa diajak berunding. Barangkali karena Arafat hampir-hampir tidak pernah bisa menolak skenario proses perdamaian yang ditawarkan Israel dan AS. Jika sikap Arafat tampak mengeras, maka hal ini semata-mata sebagai reaksi terhadap sikap keras Israel yang secara tidak langsung justru mengakibatkan naiknya popularitas kelompok-kelompok revivalis Islam seperti Hamas dan Jihad Islam Palestina (IJP) di kalangan warga Palestina di satu sisi, dan disisi lain menurunkan popularitas Arafat dan PLO. Itulah sebabnya pada Agustus 1997 Arafat mendadak menyerukan agar Hamas, IJP, PLO dan seluruh warga Palestina bersatu melawan Israel.

Gertakan Arafat membuahkan hasil, dimana setelah kunjungan Menlu AS ke kawasan Timur Tengah dan setelah keluarnya deklarasi anti-Israel dari Liga Arab (Pertengahan September 1997), Tel Aviv akhirnya kembali membekukan rencana pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Al-Quds, yang menjadi pemicu utama kemarahan warga Palestina, Arab maupun Dunia Islam. Namun, disaat-saat mulai terkuak harapan terhadap dibukanya kembali perundingan segitiga Palestina-AS-Israel, tersiar kabar perihal jatuh sakitnya Arafat.

Seperti sudah disinggung, kendati kesehatan Arafat dikabarkan sudah pulih, namun karena faktor usia, muncul pertanyaan apa yang bakal terjadi seandainya Sang Presiden secara tiba-tiba "berhenti ditengah jalan":

1. Siapa yang bakal menggantikan posisi Arafat?
2. Bagaimana nasib proses perdamaian Palestina-Israel pasca - Arafat?

Menurut Dr. Menahem Klein (ahli masalah Palestina dari Universitas Bar-Ilan), dewasa ini

sekurang-kurangnya ada dua faksi utama dilingkaran elite politik Palestina.

1. "Faksi Mahmoud Abbas alias Abu Mazen. Sekjen PLO ini tidak memegang satu jabatan formal pun di PA (Otoritas Palestina), namun ia dikenal luas sebagai calon paling kuat untuk menggantikan posisi Arafat. Abbas yang ikut mendirikan gerakan al-Fatah (kelompok terbesar dalam PLO) pada 1959 adalah seorang dokter lulusan Universitas Moskow. Ia dikenal sebagai aktivis politik PLO yang cukup senior, dan termasuk salah satu tokoh Palestina yang pertama kali menjalin kontak dengan Israel. Masalahnya, Abbas yang disinyalir memiliki vila mewah di kawasan Ramallah ini, kurang memiliki dukungan kuat dari kalangan masyarakat bawah. Ia lebih banyak tergantung pada al-Fatah.

2. "Faksi Ahmad Qurie alias Abu Ala, Ketua Dewan Legislatif Palestina yang berdasarkan "konstitusi" memiliki hak untuk mengambil alih jabatan Presiden PA sampai diselenggarakannya pemilihan umum, seandainya Arafat mendadak berhenti. Sebagaimana Abbas, Qurie juga salah satu pendiri al-Fatah. Ia digambarkan senantiasa berusaha menampilkan dirinya sebagai orang yang tidak bersikap "yes-man" terhadap Arafat. Dan berbeda dengan Abbas, Qurie mendapat dukungan cukup kuat dari kalangan masyarakat Palestina kelas bawah. Namun, Abbas dikelilingi oleh tokoh-tokoh semacam Jibril Rajoub dan Mohammed Dahlan. Walaupun Rajoub (Kepala Dinas Keamanan dan Intelijen Palestina di Tepi Barat) disebut-sebut pula sebagai salah satu kandidat pengganti Arafat, namun ia (juga Dahlan) dinilai kurang memiliki kemampuan politik untuk tampil sebagai pemimpin Palestina. Sebaliknya, Qurie hanya menjalin koalisi dengan para petinggi kepolisian di Tepi Barat dan jalur Gaza seperti Haj Ismael dan Nasser Yusuf maupun para pemimpin sipil seperti Marwan Barghouti (Sekjen al-Fatah).

Baik Abbas maupun Qurie



in defending the Palestinian people. In fact, they are already trapped into rhetoric rather than action. The Arab countries, especially those enriched by the abundant petrodollars, seem more concerned with their own comfort than with serious attempts to consider - still less to struggle for - the fate of the Palestinian nation. This has strengthened the assumption that Pan-Arabism is dead.

There are at least two factors behind the unclear attitude of Arab countries to the Palestinian problem.

1. The Arab countries, as often signalled by Middle East analysts, are afraid of the birth of an independent Palestinian nation. The Palestinian people are often considered to have a higher intellectual level than Arab peoples in general. Thus, pushing the creation of an independent Palestinian state will be like creating a "second Israel" in the Middle East.

2. Regional Arab powers, whether in the Arab League, the Organisation of the Islamic Conference or the Organisation of Petroleum Exporting Countries, are dominated by the oil rich Arab states which are close political allies - if not puppets - of the US. Thus, it is almost impossible to hope for their sincerity in taking a stand against US interests in the region, even to defend the interests of the Palestinian nation.

It cannot be forgotten that the figure of Yasser Arafat (Chairman of the Palestine Liberation Organisation and President of the Palestinian Authority) cannot be separated from the long and tiring struggle of the Palestinian people for freedom from Zionist clutches. However, Arafat's increasing age and declining health raise concerns among his supporters. Thus, there is speculation about the problem of Palestinian leadership succession. Indeed, the succession issue has been discussed since Arafat fell ill and later returned to health. One Palestinian leader said that Arafat's health is excellent. Therefore, it is

said, discussing the possibility of Arafat's fall from the political stage is very sensitive.

However, remembering Arafat's increasing age, and his role as a key leader in the Middle East peace process, it is hard to put aside the issue of Palestinian political succession. Even more with the threat from Ephraim Sneh, former Labour Party health minister, that then PM Netanyahu "really hopes that Arafat will go so that he'll have the excuse that Israel no longer has a partner to create peace in the region".

Arafat is truly seen - especially by the US and Israel - as one of the Palestinian leaders who can still be brought to negotiate. Perhaps this is because Arafat almost rejected the peace process offered by the US and Israel. If Arafat's attitude has hardened, this is as a reaction to the hard attitude of Israel which has led to the increasing popularity of Islamic Revival groups like Hamas and Islamic Jihad of Palestine (IJP) on one hand, while on the other reducing the popularity of Arafat and the PLO. This is why in August 1997 Arafat urgently suggested that Hamas, IJP, the PLO and all Palestinians join forces against Israel.

Arafat's snarling brought the result that after the visit of the US foreign minister to the Middle East and the anti-Israel declaration from the Arab League (in mid September 1997), Tel Aviv finally stated its agreement to return to the negotiating table and even agreed to abandon its plan to build Jewish settlements in the al-Quds district, which mainly incited the anger of Palestinians, Arabs and even the Islamic world. However, as hope emerged for reopening of triangular Palestine-US-Israel negotiations, news spread about the sickness of Arafat.

As indicated, although Arafat's health has reportedly recovered, in view of his age questions have emerged about what would happen if

the President suddenly "stopped in the road".

1. Who would replace Arafat?
2. What would be the fate of the Israel-Palestine peace process after Arafat?

According to Dr. Menahem Klein (an expert on the Palestine problem from the Bar Ilan University), there are currently two main factions among the Palestinian political elite.

1. The faction of Mahmoud Abbas, alias Abu Mazen, the PLO secretary-general who has no formal position in the Palestinian authority but is widely known as a strong candidate to replace Arafat. Abbas who co-founded the al-Fatah movement in the PLO (the largest group) in 1959 is a doctor from the University of Moscow. He is known as a senior PLO political activist, and one of the first Palestinian leaders to open contacts with Israel. The problem with Abbas, who owns a luxury villa in the Ramallah area, is that he has little support from common people. He depends on al-Fatah.

2. The "faction" of Ahmed Qurie alias Abu Ala, chairman of the Palestinian Legislative Body, who based on the "constitution" has the right to take over the presidency of the Palestinian Authority until elections, if Arafat suddenly steps down. Like Abbas, Qurie was a founder of al-Fatah. He was later seen as a man trying to present himself as more than a yes man for Arafat. And, in contrast to Abbas, Qurie has strong support from the common people. However, Abbas is surrounded by leaders like Jibril Rajoub and Mohammed Dahlan. Although Rajoub (Head of Security and Palestinian Intelligence in the West Bank) is also seen as a candidate to replace Arafat, he (like Dahlan) is seen as lacking the political skill to emerge as leader of Palestine. On the other hand, Qurie is only allied to senior police officers in the West Bank and Gaza - like Haj Ismael and Nasser Yusuf - and also civil leaders



dikenal sebagai tokoh-tokoh Palestina yang moderat dan memiliki komitmen sangat kuat terhadap proses perdamaian Timur Tengah. Memang, dibanding Arafat, keduanya kurang memiliki kharisma dan lebih sering tergantung pada orang-orang dekatnya masing-masing. Karena itu peluang terjadinya konflik di antara keduanya terbuka lebar, jika sepeinggal Arafat mereka tidak mampu mencapai suatu persetujuan.

Atau, bisa juga tampil tokoh-tokoh lain seperti Faisal Husseini (bekas juru runding di Konferensi Madrid 1991), Farouk Kaddoumi (kepala departemen politik PLO di Tunis), dan Salah Ta'amri (bekas komandan PLO dalam Perang Lebanon 1982), serta tokoh-tokoh Palestina di luar PLO seperti Syekh Ahmad Yassin (pemimpin spiritual Hamas). Apalagi Arafat sendiri tidak pernah mau menunjuk siapa bakal penggantinya, dan ia lebih suka menjaga keseimbangan di antara mereka yang berambisi menggantikannya.

Fenomena kepemimpinan politik di Palestina pada hakekatnya serupa dengan di negara-negara Arab lainnya (atau bahkan di negara-negara berkembang pada umumnya), di mana proses suksesi selalu dihantui oleh kemungkinan terjadinya konflik-konflik berdarah. Salah satu sebabnya adalah belum terciptanya mekanisme yang demokratis dalam menentukan kepemimpinan politik. Mayoritas penguasa di Dunia Arab mendapatkan kekuasaannya melalui jalan kudeta (seperti yang terjadi di Irak, Suriah, Libya, Aljair) atau karena faktor warisan (Arab Saudi, Yordania, dan monarki-monarki Arab lainnya). Dan ironisnya salah satu penghambat bagi berjalannya proses demokratisasi politik di Dunia Arab -- berbeda dengan di sebagian negara berkembang lainnya -- adalah keterlibatan negara-negara Barat yang selalu berusaha mencegah tampilnya para pemimpin politik alternatif yang dinilai tidak sejalan dengan garis politik mereka seperti yang terjadi di Aljazair.

Oleh sebab itu, Hamas menyerukan kepada Arafat agar

"kembali ke jalan Islam" dan lebih mengutamakan "persatuan Palestina" dalam menghadapi aliansi Israel-AS. Disisi lain, Arafat tampaknya tidak bisa mengabaikan fenomena menguatnya kelompok-kelompok Islam di Palestina. Hal ini, paling tidak, terlihat dari adanya indikasi keinginan Arafat untuk memperbaiki hubungannya dengan pemerintahan Republik Islam Iran. Sejak Juni 1997, misalnya, Arafat beberapa kali mengirim para pejabat PA untuk berkunjung ke Teheran. Seperti diketahui, hubungan PLO-Iran memburuk sejak pecahnya perang Iran-Irak (1980-1988) dimana Arafat secara terang-terangan berada di pihak Baghdad. Arafat juga sering menuduh Iran berada di belakang kelompok-kelompok Islam, khususnya Jihad Islam Palestina.

Langkah Arafat untuk menormalisasi hubungan dengan Iran, tampaknya dilandasi oleh dua faktor.

1. Keinginan Arafat untuk memperbaiki hubungannya dengan Jihad Islam maupun Hamas.

2. Guna menaikkan bargaining positionnya dalam menghadapi aliansi Israel - AS. Bagaimanapun Iran masih menjadi salah satu negara Timur Tengah yang tetap menolak skenario perdamaian AS yang jelas-jelas hanya menguntungkan posisi Israel.

Oleh karena itu, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan :

1. Jika Arafat mampu menyelesaikan konfliknya dengan kelompok Hamas maupun gerakan-gerakan Islam lainnya di Palestina serta membersihkan korupsi di lingkungan PA, maka ia relatif akan "lebih ringan" dalam menghadapi Israel. Memang, terciptanya rekonsiliasi Arafat- Hamas berarti dapat meningkatkan konfrontasi militer dengan Tel Aviv. Namun, ini akan menjadi pilihan yang paling baik bagi Arafat guna mengembalikan reputasinya di mata warga Palestina sendiri. Bagaimanapun, konsolidasi ke dalam akan selalu menjadi pilihan terbaik sebelum

berhadapan dengan kekuatan luar.

2. Jika Arafat tidak mau mengubah kebijakannya terhadap Hamas -- dengan kata lain, membiarkan berlarut-larutnya konflik antara Hamas dan PA -- serta gagal mengatasi isu dikalangan para pembantu dekatnya, maka kemungkinan berakhirnya riwayat politik Arafat tampaknya tinggal menunggu waktu saja. Arafat tidak seharusnya menutup mata, bukan hanya terhadap semakin kuatnya dukungan warga Palestina kepada gerakan-gerakan Islam, tapi juga realitas semakin tumbuhnya simpati kepada Hamas dikalangan para pendukung Arafat sendiri. Jika tidak, dunia tampaknya akan segera mengucapkan "selamat tinggal" kepada tokoh yang hampir sepanjang hidupnya dihabiskan untuk memperjuangkan nasib bangsa Palestina ini.

Seperti sudah dikemukakan di atas, faktor peranan Hamas tidak bisa diabaikan dalam membaca kemungkinan kemerdekaan negara Palestina. Tapi siapa sebenarnya Hamas? Pada tanggal 9 Desember 1987, dunia dikejutkan oleh bangkitnya gerakan kaum muda Palestina yang melancarkan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel di jalur Gaza dan Tepi Barat Sungai Yordan. Yang membuat gerakan perlawanan mereka yang kemudian dikenal dengan istilah intifada (intifadhah atau "perlawanan") begitu fenomenal adalah :

1. Keberanian mereka menantang pasukan Israel yang dilengkapi berbagai senjata mutakhir, sementara "senjata" mereka hanya berupa batu-batu dan ban-ban bekas. Namun, justru karena itulah, intifada yang hampir setiap saat diliput oleh media elektronik maupun cetak berhasil membangkitkan simpati dunia internasional, khususnya Dunia Islam. Perlawanan kaum muda Palestina terhadap pasukan Israel itu bagaikan "David" yang tengah melawan "Goliath."

2. Kendati hanya "bersenjata-



like Marwan Barghouti (secretary-general of al-Fatah).

Both Abbas and Qurie are known as moderate Palestinian leaders with a strong commitment to the peace process. Indeed, compared to Arafat, they both lack charisma and often depend on their close supporters. Thus, the chance of open conflict between the two is great if they are unable to reach an agreement on Arafat's death. Alternatively, other leaders may emerge, such as Faisal Husseini (former negotiator in the Madrid conference of 1991), Farouk Kaddoumi (head of the PLO's political department in Tunis), and Salah Ta'amri (former commander of the PLO in the 1982 Lebanon War), or leaders from outside the PLO like Syaikh Ahmad Hussein (spiritual leader of Hamas). Arafat himself has not wanted to indicate who should succeed him and has preferred to maintain balance between those hoping to replace him.

The phenomenon of leadership in Palestine is in essence the same as that in other Arab countries (or even in developing countries in general), where the process of succession is always haunted by the possibility of bloody conflict. One reason is the absence of a democratic mechanism for determining political leadership. Most power holders in the Arab world obtained power through coups d'etat (as in Iraq, Syria, Libya and Algeria) or through descent (Saudi Arabia, Jordan and other monarchies). And, ironically, one obstacle to the democratic process in the Middle East- in contrast to other developing countries is the involvement of Western countries which always try to prevent the emergence of alternative political leaders who do not accord with their political aims, as happened in Algeria.

Thus, Hamas urged Arafat to "return to the path of Islam" and prioritize the "unity of Palestine" in facing the Israel-US alliance. On the other hand, Arafat seemingly cannot overlook the phenomenon of

increasing strength of Islamic groups in Palestine. This fact at least is seen from the indications of Arafat's wish to improve relations with the Islamic Republic of Iran. Since June 1997, for example, he sent several Palestinian Authority officials to Teheran. As is known, PLO-Iran relations worsened since the outbreak of the Iran-Iraq war (1980-1988) in which Arafat clearly supported Baghdad. Arafat also often accused Islamic groups of being behind Islamic groups, particularly Islamic Jihad of Palestine.

Arafat's steps to normalise relations with Iran, are brought about by two factors.

1. The desire of Arafat to improve relations with Islamic Jihad and Hamas.
2. To improve his bargaining position in facing the Israel-US alliance. Anyway, Iran is still one of the Middle East countries which still rejects the American peace scenario which obviously benefits only Israel.

Thus, there are two possibilities for the future:

1. If Arafat is able to end the conflict with Hamas or other Islamic movements in Palestine and clean up corruption in the Palestinian authority, he will have an easier job in facing Israel. Reconciliation with Hamas means he can step up military confrontation with Tel Aviv. But this will be the best choice for Arafat to restore his reputation in the eyes of the Palestine people. In any case, internal consolidation will always be the best choice before facing outside powers.

2. If Arafat does not want to alter his policy toward Hamas- in other words, if he allows the conflict between Hamas and the Palestinian authority to continue- and fails to overcome the corruption among his close associates, then the end of Arafat's political story is only a matter of time. Arafat must not close his eyes, not

only to the growing support among Palestinians for Islamic movements, but also to the growing sympathy for Hamas among Arafat's own supporters. Otherwise, it seems the world will soon say goodbye to the leader who has given almost his whole life to struggle for the Palestinian people.

As mentioned above, the role of Hamas cannot be overlooked in assessing the prospects for peace in Palestine. But, in reality, who are Hamas? On the 9th December 1987, the world was astonished by the emergence of a movement of young Palestinians who attacked occupying Israeli troops in Gaza and the West Bank of the Jordan. What made their opposition- later known as intifada (intifadhah, meaning "opposition")- so phenomenal was:

1. Their audacity in taking on Israeli troops equipped with the latest weapons, while their weapons were only rocks and used tyres. But for this very reason, intifada, covered at almost every instant by electronic and print media, was able to raise sympathy in the outside world, especially the Islamic world. Opposition of young Palestinians against Israeli troops was a David and Goliath struggle.

2. Although only armed with stones and old tyres, the intifada strugglers were truly supplied by their religious faith in Islam which strongly told them that their struggle against the Zionists was a part of jihad fi sabihillah (a fight in the name of Allah), and that if they died (syahid) then god would immediately take them to heaven. Thus, the intifada strugglers placed the Israeli regime in a dilemma. The greater the struggle of Israel to overcome the intifada, the greater the opposition they confronted, and on the other hand the greater the also the pressure from defenders of human rights from various corners of the world on Tel Aviv. On the other hand if Israel softened its stance then intifada would broaden.



kan" batu-batu dan ban-ban bekas, para pejuang intifada sebenarnya dibekali oleh keyakinan agama (Islam) yang sangat kuat bahwa berjuang melawan kaum Zionis adalah bagian dari jihad fi sabilillah (berperang di jalan Allah), dan jika tewas atau syahid maka Tuhan akan langsung memasukkan mereka ke dalam surga. Oleh sebab itu, para pejuang intifada berhasil menempatkan rezim Israel dalam posisi yang dilematis. Semakin keras tindakan Israel untuk menumpas intifada, semakin keras perlawanan yang harus mereka hadapi dan, di sisi lain, semakin keras pula kecaman dari perlawanan yang harus mereka hadapi dan, di sisi lain, semakin keras pula kecaman dari para pembela hak-hak asasi manusia (HAM) dari berbagai penjuru dunia terhadap Ted Aviv. Sebaliknya, jika Israel melunakkan sikapnya, maka dengan sendirinya gerakan intifada justru semakin meluas.

3. Pada umumnya intifada dilancarkan oleh para remaja Palestina yang berusia antara 15 sampai 20 tahun. Dengan kata lain, mereka adalah generasi muda Palestina yang tidak secara langsung mengalami masa-masa "revolusi perjuangan" melawan Israel, baik dalam perang 1948 maupun 1967. Namun, karena sejak lahir tinggal di wilayah pendudukan, mereka justru yang paling merasakan secara langsung kekejaman baik berupa kebijakan sosial-ekonomi yang diskriminatif maupun bentuk-bentuk represi fisik lainnya yang dilakukan rezim Zionis. Dalam hal ini, mereka jelas lebih banyak berjuang dari "luar" dan -- kendati hidup di pengasingan -- menjalani kehidupan yang lebih "enak".

4. Intifada telah terbukti memberikan sumbangan terbesar bagi perjalanan sejarah bangsa Palestina, terutama karena keberhasilannya dalam membukakan mata dunia internasional, bahwa penderitaan bangsa Palestina di wilayah pendudukan, dan kebiadaban penguasa Israel, yang telah berlangsung puluhan tahun tidaklah mungkin

dibiarkan berlarut-larut. Apalagi kebangkitan intifada terjadi hampir bersamaan waktunya dengan menguatnya gelombang demokratisasi serta advokasi terhadap HAM disegenap penjuru dunia. Mereka yang semula kurang memperhatikan nasib Palestina, setelah terjadinya intifada yang telah menyebabkan syahidnya ribuan kaum muda Palestina, kemudian menjadisimpati terhadap perjuangan kaum muda di Gaza dan Tepi Barat itu.

Sementara itu, besarnya biaya ekonomi (ditambah dengan derasnya kecaman dari komunitas internasional), telah berhasil membelah opini di kalangan masyarakat Israel sendiri. Maka, mulai muncullah gerakan semacam "Peace Now" ("Damai Sekarang") di kalangan masyarakat Israel sendiri yang menghendaki agar Tel Aviv menerapkan kebijakan yang lebih luwes terhadap Palestina maupun para tetangga Arabnya yang lain. Juga formula "land-for-peace" mulai diterima oleh sebagian elite politik Israel, seperti (mending) Yitzhak Rabin yang semula tergolong tokoh garis keras. Pada ujungnya, peranan politik intifada jelas tidak bisa diabaikan dalam mendorong kesediaan rezim Israel untuk menanda-tangani perjanjian damai -- dengan dan memberikan otonomi terbatas kepada -- pihak Palestina. Sekalipun implementasi penuh perjanjian Palestina-Israel sempat terhambat oleh naiknya Benyamin Netanyahu sebagai PM Israel, namun kemudian berhasil dilanjutkan oleh PM Ehud Barak (yang mengalahkan Netanyahu dalam pemilu 1999).

Bagi Yasser Arafat dan PLO-nya, intifada juga telah terbukti memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam meringankan perjuangan mereka menghadapi Israel maupun AS. Kendati secara ideologis, ada perbedaan cukup tajam antara kubu PLO (yang nasionalis-sekuler) dan para penggerak intifada (yang nasionalis-Islamis), namun tujuan mereka sama, yaitu terbentuknya Negara Palestina Merdeka. Dalam hal strategi global perjuangan bangsa Palestina, munculnya intifada yang

lebih menekankan pada perjuangan fisik, secara langsung maupun tidak langsung, turut mendukung PLO yang lebih mengutamakan perjuangan di bidang diplomasi. Disini kembali terbukti, apa yang menjadi "tesis" para jago strategi dunia bahwa, diplomasi dan perang (fisik) ibarat dua sisi dari satu mata uang yang sama.

Keberhasilan gerakan intifada tersebut tidak terlepas dari peranan kelompok Hamas (Harakat al-Muqawamah al-Islamiah) atau Gerakan Perlawanan Islam. Dalam lebih dari satu dekade terakhir ini, Hamas (yang juga bisa berarti "semangat") memang merupakan organisasi Islam Palestina paling penting di kawasan jalur Gaza maupun Tepi Barat. Dan, sangat mustahil bagi siapa pun jika membicarakan intifada tanpa menyinggung peranan Hamas.

Sebelum naiknya Barak, Israel memutuskan untuk menghentikan perundingan perdamaian dengan pihak pemerintahan Otoritas Palestina (PA) di bawah kepemimpinan Arafat. Dalih yang dipakai Tel Aviv, adalah merebaknya serangan "bom jihad" terhadap warga Yahudi di Al-Quds dan sekitarnya. Bukan hanya itu. Penguasa Israel pun, terus melancarkan operasi militer secara besar-besaran, baik terhadap basis-basis perjuangan Hamas di wilayah pendudukan, maupun terhadap basis-basis Hizbullah (Partai Allah) di Lebanon selatan.

Di masa kekuasaan Netanyahu, proses perdamaian Palestina-Israel yang disponsori AS itu mengalami jalan buntu, yang setiap saat dapat membawa kembali Timur Tengah ke tepi jurang konflik berdarah yang lebih dahsyat. Seperti sudah disinggung, Netanyahu lebih banyak menyadarkan basis kekuasaannya pada kaum zionis garis keras yang secara tegas menolak segala bentuk kompromi dengan pihak Palestina, Arab dan bahkan dengan seluruh Dunia Islam. Ini terlihat jelas dari sikap provokasi mereka yang seringkali dengan sengaja memancing kemarahan Dunia Islam.

Di sisi, Tel Aviv justru menjadi-



3. In general the intifada was launched by Palestinian youths aged between 15 and 20 years old. In other words, they were the young Palestinian generation which had not directly experienced the period of "revolutionary struggle" against Israel in the wars of 1948 and 1967. But from birth they had lived in the occupied territories and therefore greatly felt the cruelty - both through discriminatory socioethnic-economic measures and other physical forms of repression - carried out by the Zionist regime. In this case, they clearly suffered and were considered more daring than for example, the PLO fighters, who struggled from outside - and although living abroad - experienced a "better" life.

4. The intifada gave the greatest thrust to the progress of the Palestinian people, chiefly because of their success in opening the eyes of the international community that the suffering of the Palestinian people in the occupied territories, and the savagery of the Israeli occupiers, which had gone on for decades, could not continue. The more so because the growth of the intifada happened at almost the same time as the strengthening of the wave of advocacy of human rights in every corner of the world. Those who had previously ignored the plight of the Palestinian people, became more sympathetic to the struggle of the Gaza and West Bank youths after the intifada which caused the syahid of thousands of young Palestinians.

Meanwhile, the great economic cost (plus the torrent of pressure from the international community) which Tel Aviv had to bear to destroy - unsuccessfully - the intifada movement, helped to turn opinion among the Israeli people themselves. Thus, there began movements such as "Peace Now" among the Israeli people themselves, wishing the Israeli government to adopt a more flexible policy toward the Palestinians and other Arab neighbours. The formula of "land for peace" began to be accepted

by some of the Israeli elite, such as the late Yitzhak Rabin, who had earlier been among the hardline leaders. In the end, the political role of the intifada cannot be set aside in pushing the Israeli regime to sign a peace agreement with - and to give limited autonomy to - Palestine. Once the full implementation of the Palestine-Israel agreement was hampered by the election of Benjamin Netanyahu as prime minister of Israel, but later continued by Ehud Barak, who defeated Netanyahu in the general elections of 1999.

For Yasser Arafat and the PLO, the intifada also proved to be a valuable contribution to lessening the weight of their struggle against Israel and the USA. Although ideologically there were acute differences between the body of the PLO, which was secular-nationalist, and the leaders of the intifada, who were nationalist-Islamist, they had the same goal, the establishment of an independent Palestinian state. As it turned out in the global strategy of the struggle of the Palestinian, the intifada, which rather emphasised physical struggle, directly or indirectly supported the PLO, which prioritized struggle in the diplomatic field. It has been proved again in this case, as experts in international strategy have asserted, that diplomacy and physical struggle are two sides of the same coin.

The success of the intifada cannot be separated from the role of Hamas (Haraqat al-Muqawamah al-Islamiyah) or the Islamic Opposition Movement. In the past decade or so Hamas (which can also mean enthusiasm) has indeed been the most important Palestinian Islamic organisation both in the West Bank and Gaza. It would be impossible for anyone to discuss the intifada without citing the role of Hamas.

Before the election of Barak, Israel decided to stop peace negotiations with the Palestinian Authority (PA) under the leadership of Arafat. The excuse used by Tel Aviv

was the wound from "jihad bomb" attacks on Jews in al-Quds and around. Not only this. The Israeli power holders launched continuous major military operations, both against Hamas bases in the occupied territories and against Hizbullah bases in southern Lebanon.

During Netanyahu's term, the Palestine-Israel peace process sponsored by the US reached a dead end, which at every moment brought the Middle East back to the edge of the precipice of even more terrible bloody conflict. As mentioned above, Netanyahu leaned more on his power base among hardline Zionists who strongly resisted any form of compromise with the Palestinians, Arabs and even with the whole Islamic world. This was clearly seen from their provocative actions which often aroused the anger of the Islamic world.

On the other hand, Tel Aviv used the actions launched by Islamic movements - including Hamas, Islamic Jihad of Palestine and Hizbullah - as excuses to seek sympathy from the international community, particularly the US and Europe. Israel repeatedly tried to stall the international community by accusing the Islamic movements of "terrorism". Meanwhile, the root of their actions, such as the spreading of Jewish settlements in the occupied territories and the provocation launched by Jewish extremists against the Islamic community, were not mentioned at all.

The most basic source of the Arab-Israeli conflict, everyone knows, are the basic rights of the Palestinian nation to enjoy independence. Of course this means in a homeland and free state as possessed by other nations of the earth. Israel and the US must know this. What is hard to understand is why the Israeli-US alliance is so opposed to the setting up of an independent Palestinian state.

Ironically, the US always claims to uphold - and presses to promote -



kan aksi-aksi yang dilancarkan gerakan Islam—baik Hamas, jihad Islam Palestina, maupun Hizbullah sebagai dalih untuk mendapatkan “belas kasihan” dari dunia internasional, khususnya AS dan Eropa. Berangkali Israel berupaya mengelabui dunia internasional dengan menuding aksi-aksi gerakan Islam itu sebagai “terorisme”. Sementara akar dari munculnya aksi-aksi itu, seperti perluasan pemukiman Yahudi di daerah pendudukan serta provokasi yang dilancarkan kaum ekstrimis Yahudi terhadap umat Islam, sama sekali tidak pernah disinggung sedikitpun.

Sumber paling mendasar dari konflik Arab-Israel, semua orang tahu, adalah hak asasi bangsa Palestina untuk memiliki kemerdekaan mereka sendiri. Tentu saja dalam sebuah tanah air dan negara merdeka sebagaimana yang dimiliki bangsa-bangsa lain di dunia ini. Israel maupun AS pasti mengetahuinya. Yang sulit dipahami adalah, mengapa kubu Israel-AS sama sekali tidak menghendaki terbentuknya negara Palestina merdeka?

Ironisnya, AS selalu mengklaim menjunjung tinggi -- dan bertekad mempromosikan -- HAM (hak-hak asasi manusia) dan nilai-nilai demokrasi. Tapi, mengapa AS justru akan terus membendung terbentuknya negara Palestina? Bisa jadi AS merasa khawatir, jika negara Palestina merdeka terbentuk, maka secara potensial ia bisa menjadi ancaman serius terhadap eksistensi negara Israel. Alasan ini sepintas tampak “masuk akal”. Namun, ditinjau dari realitas politik yang sesungguhnya, jelas sangat tidak masuk akal. Seluruh negara Arab pun, terbukti tidak mampu mengalahkan Israel, apalagi sebuah negara bernama Palestina.

Dalam sejarahnya, perang-perang besar antara Arab dan Israel, yang terjadi pada 1948; 1956; 1967; 1973; maupun 1982, terbukti tidak pernah sekalipun dimenangkan oleh pihak Arab. Keunggulan komparatif yang dimiliki Israel tidak hanya ada pada sistem pertahanan

dan keamanan mereka yang supercanggih, sehingga tidak ada satu negara Arab pun yang mampu menandinginya, melainkan juga pada kelihaian mereka dalam menguasai jaringan informasi dunia, serta dalam membangun jaringan lobi-lobi yang mampu mengendalikan negara superpower seperti AS. Ketidakmampuan AS menekan Israel menjadi salah satu contoh.

Akan tetapi, ada alasan lain— yang bisa jadi “lebih masuk akal” — di balik keengganan kubu AS-Israel untuk mendukung pembentukan negara Palestina. Yaitu kebutuhan Israel terhadap keberadaan “musuh dari luar” yang abadi. Bangsa Yahudi yang mendiami negara Israel, kendati dari luar tampak sangat solid, pada hakekatnya sangat rawan terhadap munculnya perpecahan internal. Hal ini disebabkan adanya perbedaan latar belakang sosio-kultural yang cukup tajam, terutama antara mayoritas kaum Yahudi keturunan Asia-Afrika (Sephardic)— yang lebih fanatik tapi kurang memiliki akses ekonomi-politik— dengan minoritas kaum Yahudi keturunan Eropa (Ashkenazic)— yang lebih sekuler tapi memegang kendali ekonomi-politik domestik.

Belum lagi perbedaan visi antara mereka yang pro-perdamaian (*yang dipelopori Gerakan Damai Sekarang atau Peace Now Movement*) dan mereka yang anti-perdamaian Arab-Israel. Seperti ditulis oleh Robert S. Wistrich, bahwa masalah Timur Tengah bukanlah sekedar konflik Palestina-Israel atau Arab-Yahudi yang selama ini telah menyedot perhatian sangat besar dari kalangan politisi, akademis, maupun media massa. Melainkan, kata Wistrich, “*It also about those internal Jewish factors which have shaped Israeli collective consciousness and national-cultural identity during the past one hundred years— in all their pluralism, ambivalence, and contradictions.*”

Itulah sebabnya, “musuh dari luar” selalu dibutuhkan oleh Israel maupun AS sebagai pendukung utamanya. Dalam hal ini jelas tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali

terus menempatkan bangsa Palestina— atau Arab dan Islam pada umumnya— sebagai “musuh dari luar” yang abadi guna mencegah terciptanya bangsa Israel sendiri. Bukanlah sudah wajar dalam politik bahwa satu-satunya jalan (pintas) untuk mencegah perpecahan internal adalah dengan menciptakan “musuh dari luar”?

Memang, sejak naiknya Ehud Barak pada Mei 1999 ada peluang bagi berlanjutnya proses perdamaian Arab-Israel. Kendati sempat terhenti beberapa kali, namun kesediaan Israel mengembalikan 6,1% wilayah Tepi Barat kepada Palestina, pada 21 Maret 2000, dianggap sebagai sebuah “terobosan” yang berarti bagi berlanjutnya proses perdamaian di kawasan ini. Dunia internasional pun ikut merasa lega atas penyerahan wilayah seluas 341,6 km persegi itu. Dengan tambahan 6,1% itu, Palestina kini menguasai sekitar 40 persen wilayah Tepi Barat. Meski demikian, Palestina sudah bertanggung jawab penuh atas kehidupan sekitar 60 persen penduduk di Tepi Barat (total penduduk Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza lebih dari tiga juta orang).

Jika momentum seperti tersebut dapat terus dipertahankan, maka sebenarnya status final bagi proses perdamaian yang ditargetkan pada September 2000 ini akan dapat tercapai. Namun, kegagalan perundingan Arafat-Barak-Clinton di Camp David, Maryland, AS— yang sering disebut sebagai KTT Camp David II— pada Juli lalu menyebabkan jalan ke arah perdamaian Timur Tengah menjadi tidak mudah dan mulus. Berbagai rintangan yang dapat menjadi kerikil-kerikil tajam diantaranya adalah masalah status kota Al-Quds, soal pengungsi Palestina, pemukiman Yahudi, dan pembagian sumber air. Belum lagi soal Dataran Tinggi Golan milik Suriah. Dengan demikian, proses perdamaian di kawasan ini tampaknya masih membutuhkan waktu cukup panjang.



the values of human rights and democracy. So why is the US so opposed to the setting up of an independent Palestinian state? Perhaps the US is worried that an independent Palestinian state might become a serious threat to the existence of the state of Israel. This reason makes sense at first glance. But, considered realistically, it does not make sense. All the Arab nations have proved unable to defeat Israel, so why should a country called Palestine?

In history, the great wars between Arabs and Israelis, which occurred in 1948, 1956, 1967, 1973 and 1982 could not once be won by the Arab countries. Israel's comparative superiority lay not only its superdeveloped defence and security system, so that no Arab country could challenge it, but also in their shrewd control of the world's information networks, and in building lobby networks able to control superpowers like the US. The inability of the US to put pressure on Israel is an example of this.

There is however another reason which makes more sense behind the refusal of Israel and the US to support a state for Palestine. This is the need of Israel for an eternal outside enemy. The Jewish nation located in the state of Israel, although outwardly solid, is inwardly very prone to the emergence of internal cleavages. This is caused by the acutely different socioethnic-cultural backgrounds, chiefly between the majority of Jews of Asian-African descent (Sephardim)-who are more fanatic but have less economic and political access- and the minority of Jews of

European descent (Ashkenazim)-who are more secular but control domestic economics and politics.

There is also a difference of vision between those who are pro-peace (led by the Peace Now Movement) and those who oppose Arab-Israeli peace. As Robert S. Wistrich has written, the Middle East problem is not about the Palestine-Israel conflict or the Arab-Jewish conflict which has attracted all the attention of politicians, academicians and the mass media. Rather, says Wistrich, "It is also about those internal Jewish factors which have shaped Israeli collective consciousness and national-cultural identity during the past one hundred years- in all their pluralism, ambivalence and contradictions."

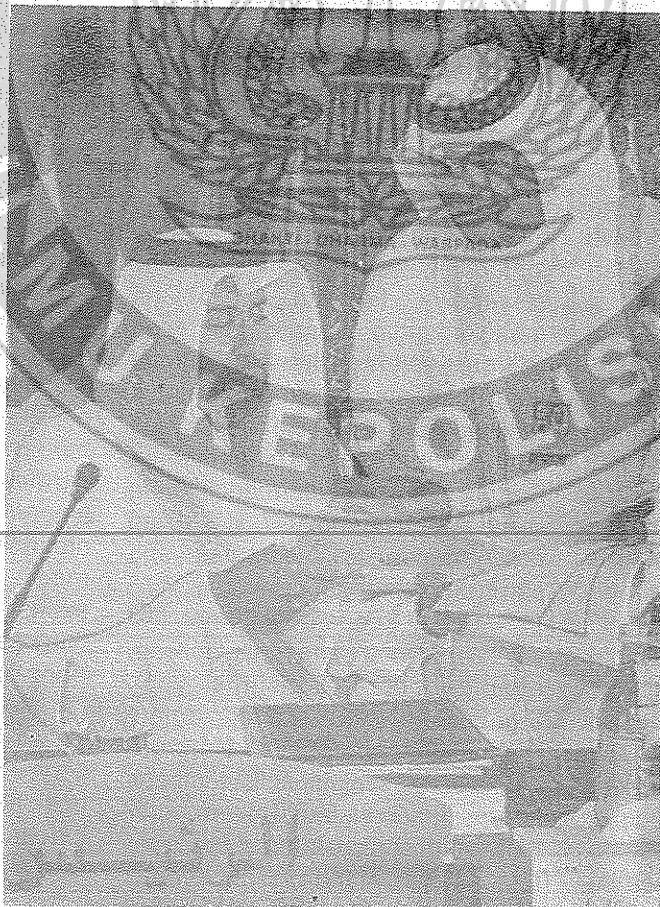
This is why "the outside enemy" is always needed by Israel and by the US as its main supporter. In this case

clearly there is no other choice for them but to place the Palestinian nation- or Arabs and Islam in general- as the "outside enemy" which is forever used to prevent break up among the Israeli people themselves. Is it not natural in politics that one (temporary) way to prevent internal break up is to create an "outside enemy"?

Indeed, since the election of Ehud Barak in May 1999 there has been a chance for the continuation of the Arab-Israeli peace process. Although it has been suspended several times, the agreement of Israel to return 6.1% of the West Bank to Palestine on 21 March 2000 was considered a significant breakthrough for the continuation of the peace process. The international community was also relieved about the handover of these 341.6 km². With this extra 6.1%, Palestine controlled about 40% of the West Bank. However, Palestine was fully responsible for about 60% of the inhabitants of the West Bank (the total population of the West Bank and Gaza was over three million people).

If this momentum can be maintained, then indeed the final status for the peace process targeted for September 2000 will be achieved. However, the failure of the Arafat-Barak-Clinton negotiations in Camp David, Maryland, US- often called the second Camp David summit- last July caused the road to peace in the Middle East to become hard and unclear. Some hindrances becoming sharp differences between them are the status of the city of al-Quds, Palestinian refugees, Jewish settlements, and water sharing. This does not even include the problem of Syria's Golan Heights. Thus, the peace process in this area will still require a long time.

Kompas



Up to now the Arab countries has been no seriousness seen from defending the Palestinian people.